

ABSTRAK

Judul : Analisis Pelaksanaan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunan Non Rumah Tinggal di Wilayah Kota Jakarta Timur, Nama : Slamet Rivaldi, Nim : 41118110186. Dosen Pembimbing : Dr. Ir. Mawardi Amin., MT. 2022.

Penelitian ini didasari oleh Peraturan Menteri PUPR No.27/PRT/M/2018 disebutkan bahwa Sertifikat Laik Fungsi (SLF) merupakan sertifikat yang diterbitkan oleh pemerintah daerah terhadap bangunan yang telah selesai dibangun sesuai IMB (Izin Mendirikan Bangunan) dan telah memenuhi persyaratan teknis sesuai fungsi bangunan berdasar hasil pemeriksaan dari instansi maupun konsultan Sertifikat Laik Fungsi bangunan terkait. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab bangunan non rumah tinggal di Wilayah Jakarta Timur belum memperoleh izin terbit Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dan mengetahui kendala yang dihadapi dalam proses permohonan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) bangunan gedung non rumah tinggal di Wilayah Jakarta Timur.

Metodologi yang digunakan menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif yang berlandaskan pada filsafat positivisme yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif statistik. Metode yang dipakai menggunakan deskriptif dengan melakukan uji relasi antar variabel untuk mengetahui nilai variabel mandiri. Pada penelitian ini populasi merupakan pihak yang melakukan permohonan pelaksanaan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) pada tahun 2021 hingga 2022 dengan jumlah 30 responden pemohon dari perusahaan di Wilayah Kota Jakarta Timur.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tiga penyebab utama bangunan non rumah tinggal belum memperoleh izin terbit SLF yang pertama dengan nilai IKR 0,61 yaitu Keberatan dalam memenuhi IPPR kewajiban untuk menyediakan prasarana lingkungan, fasilitas umum dan fasilitas sosial ke Pemerintah Daerah, kedua dengan nilai 0,51 yaitu Dokumen persyaratan Permohonan SLF tidak lengkap, dan ketiga dengan nilai IKR 0,51 yaitu Ketidaksesuaian antara fisik bangunan di lapangan dengan gambar IMB dan As build drawing. Sedangkan tiga kendala utama yang dihadapi pada pelaksanaan SLF adalah yang pertama Kesulitan dalam memenuhi kondisi bangunan eksisting sesuai dengan intensitas yang diizinkan seperti KDH, KLB dan KDH dengan nilai IKR 0,64, kedua Kesulitan melengkapi laporan Direksi pengawas oleh pengawas yang mempunyai Izin Pelaku Teknis Bangunan (IPTB) dengan nilai IKR 0,63, dan ketiga Kesulitan mendapatkan rekomendasi teknis pemeriksaan dari Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi terkait pengesahan pemakaian bejana tekan, gondola, alat angkut, lift, penangkal petir dan listrik dengan nilai IKR 0,62.

Kata kunci: Bangunan Gedung, Persyaratan Teknis dan Administratif, Sertifikat Laik Fungsi (SLF)

ABSTRACT

Title : Analysis of the Implementation of Functional Worthiness Certificate (SLF) for Non Residential Buildings in East Jakarta City Area, Name: Slamet Rivaldi, NIM: 41118110186. Supervisor: Dr. Ir. Mawardi Amin., MT. 2022.

This research is based on the Minister of PUPR Regulation No.27/PRT/M/2018, it is stated that the Function Feasibility Certificate (SLF) is a certificate issued by the local government for buildings that have been completed in accordance with the IMB (Building Permit) and have met the technical requirements according to the function. the building based on the results of the inspection from the relevant agency or consultant for the Functional Worthiness Certificate of the building. This study aims to determine the cause of non-residential buildings in the East Jakarta Region that has not obtained a permit to issue a Certificate of Feasibility Function (SLF) and to find out the obstacles faced in the application process for a Certificate of Feasibility Function (SLF) for non-residential buildings in the East Jakarta Region.

The methodology used is a quantitative research approach based on the philosophy of positivism which is used to examine a particular population or sample, data collection using research instruments, and statistical quantitative data analysis. The method used is descriptive by conducting a relational test between variables to determine the independent value variable. In this study, the population is the party requesting the Functional Function Certificate (SLF) in 2021 to 2022 with a total of 30 applicant respondents from companies in the East Jakarta City Region.

The results showed that the three main causes of non-residential buildings not obtaining an SLF issuance permit, the first with an IKR value of 0.61, namely objections in fulfilling the IPPR obligation to provide environmental infrastructure, public facilities and social facilities to the Regional Government, the second with a value of 0.51 namely the incomplete SLF application requirements document, and the third with an IKR value of 0.51, namely the discrepancy between the physical building in the field with the IMB drawings and As build drawings. The three main obstacles faced in the implementation of the SLF are the first to understand in fulfilling the conditions of the existing building in accordance with the permitted intensity such as KDH, KLB and KDH with an IKR value of 0.64, secondly completing the report of the Board of Directors by supervisors who have a Building Technical Actor Permit (IPTB). with an IKR value of 0.63, and obtain work recommendations from the relevant Manpower Office related to the use of gondola, lightning transport equipment, elevators, rods and electricity with an IKR value of 0.62.

Keyword: *Building, Technical ad administrative requirements, Function-worthy Certificate (SLF)*